

## MENUJU PENDIDIKAN ACEH YANG BERBASIS *ENTREPRENEURSHIP*

**Muhammad Shabri A. Majid**

*Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh*

*E-mail: hannanan@gmail.com*

**Abstrak** : This article is aimed at discussing descriptively the important role of educational institution in Aceh in producing the entrepreneurial-minded graduates. Limitations of jobs available for graduates of educational institutions, especially in Aceh require educational institutions to be able to produce the graduates who can create employment opportunities, rather than seize the existing jobs offered by the government and private agencies. A formal and an informal entrepreneurship-based education are believed to be able to offer alternative solutions to create job opportunities, and in turns will solve economic problems of Aceh by boosting economic growth and enhancing welfare of the people of Aceh. In order to create the entrepreneurship education become more effective and be able to produce young entrepreneurs in Aceh, the educational institutions there should reformulate curriculum-based entrepreneurship, enhance the cooperation and partnerships with the private sector, and attract more supports from the government and public sector. The quality, skills, and experiences of the entrepreneurial teachers/tutors must also be countiously improved.

**Keywords:** Entrepreneurship education, unemployment, business partnership, poverty, welfare.

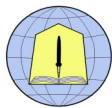
### PENDAHULUAN

Walaupun perekonomian Aceh mengalami pertumbuhan positif pasca konflik (1989 – 2004) dan tsunami (2004), yang ditunjukkan oleh (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB, sebanyak 6,06 persen pada tahun 2012, namun masih banyak orang miskin di Aceh. Apalagi pertumbuhan PDRB Aceh dengan memasukkan unsur minyak dan gas yang hanya 5,20 persen pada tahun 2012 (Aceh Dalam Angka, 2013), karena cadangan minyak dan gas yang dimiliki bumi Aceh semakin berkurang, maka tanpa kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat diprediksikan jumlah penduduk Aceh yang miskin akan semakin bertambah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, terdapat 20,98 persen penduduk Aceh yang miskin pada tahun 2010, 19,48 persen pada tahun 2011, dan 18,58 persen pada tahun 2012. Memang jumlah penduduk miskin Aceh sejak 2010-2012 semakin berkurang, tapi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi lain di Indonesia, apatah lagi negara maju, maka angka penduduk miskin di Aceh masih relatif banyak. .

Banyaknya jumlah masyarakat Aceh yang hidup di bawah garis kemiskinan (*poverty line*), diantaranya, disebabkan belum tersedianya lapangan kerja yang memadai. Lebih dari 75 persen masyarakat Aceh bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sangat sedikit (kurang dari 25 persen) yang bekerja di sektor swasta dan memiliki usaha sendiri. Pada tahun 2006, tingkat pengangguran di Aceh mencapai 10,43 persen, 9,84 persen pada tahun 2007, 9,56 persen pada tahun 2008, 8,71 persen pada tahun 2009, 8,60 pada tahun 2010, 7,85 persen pada tahun 2011, 9,10 persen pada tahun 2012, dan 8,38 pada tahun 2013 (BPS Aceh, 2014).

Jika dilihat komposisi pengangguran di Aceh, maka ianya didominasi oleh mereka yang hanya tamat SD, SMP, SMA dan sederajat. Pada tahun 2007-2008, jumlah pencari kerja tamatan SD, SMP dan SMA adalah sebanyak 72,03 persen dan sisanya 27,97 persen adalah terdiri dari pencari kerja tamatan Sarjana Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3). Sedangkan, pada tahun 2008-2009, jumlah pencari kerja tamatan SD, SMP dan SMA naik menjadi 73,41 persen, dan sisanya 26,59 persen adalah para pencari kerja tamatan Sarjana Muda dan S1, S2, dan S3 (Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, 2010). Dan mayoritas pencari kerja tamatan SD, SMP dan SMA di Aceh pada tahun 2013 tersebut adalah mereka yang berusia antara 15 sampai dengan 19 tahun (BPS Aceh, 2014).

Melihat data di atas, memang pemerintahan Aceh sejak beberapa tahun belakangan ini hingga 2011 telah mampu menurunkan jumlah pengangguran masyarakat Aceh dari dua ke satu digit, namun tingkat pengangguran di Aceh pada tahun 2010 masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional (7,14 persen), dan negara-negara ASEAN, seperti Malaysia (3,3 persen), Singapore (2,2 persen) dan Thailand (1,04 persen) (*World Economic Indicator*, 2010). Tingkat pengangguran di Aceh ini diperkirakan akan meningkat drastis, setidaknya, untuk setelah tahun 2012 seiring dengan ditekennya Surat Keputusan Bersama (SKB) pada 24 Agustus 2011 oleh tiga Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri) terkait Moratorium atau penghentian sementara perekrutan PNS di Indonesia yang resmi berlaku mulai 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. Melihat fenomena di atas, maka diperlukan kebijakan strategis untuk mengentaskan kemiskinan, menyediakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Artikel ini akan memaparkan tentang pentingnya



peran institusi pendidikan dasar dan menengah dalam melahirkan *entrepreneurs* di Aceh. Dalam paparannya, sudah tentu, keberadaan *entrepreneurs* di negara lain dan Indonesia akan dibahas dalam artikel ini sebagai bahan perbandingan

### **PERAN ENTREPRENEUR DALAM PEREKONOMIAN ACEH**

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebuah negara dan daerah, termasuk Aceh, sangat ditentukan oleh kontribusi sektor rumah tangga (household), swasta (private), pemerintah (government) dan sektor luar negeri (foreign). Dari ke empat sektor ini, sektor swasta adalah yang paling sukar untuk dikendalikan, karena ianya bersifat sangat tidak stabil (vulnerable) (Froyen, 2009). Jika Aceh mampu mengendalikan dan juga mengembangkan sektor swasta ini, maka ekonomi Aceh akan mengalami pertumbuhan signifikan. Sektor swasta, yang terdiri dari para pengusaha atau entrepreneurs (wirausaha) skala besar, menengah dan kecil, inilah yang melakukan investasi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi jumlah pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan, pada gilirannya, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah entrepreneurs di sebuah negara akan membawa kemajuan pesat bagi negara tersebut. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) dalam laporannya tahun 2009 menyebutkan bahwa kesejahteraan yang dialami Amerika Serikat, salah satunya, dikarenakan 11 persen penduduknya adalah entrepreneurs. Begitu pula Singapura, 7 persen penduduknya menjadi entrepreneurs. Sedangkan di Indonesia, jumlah entrepreneurs hanya sekitar 0,18 persen dari total jumlah penduduk. Data lain dari hasil riset Merryll Lynch (2009) menyatakan perbandingan orang kaya di Indonesia : Amerika Serikat : Singapura adalah 1: 13: 141.

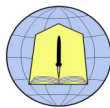
Kalau kita bandingkan jumlah perusahaan baru (new entrepreneur) yang muncul dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang telah ada pada tahun sebelumnya pada tahun 2003-2005, Indonesia yang berada di benua Asia memiliki rata-rata perusahaan baru yang masuk ke dalam industri sebanyak 6,70 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Afrika dan Timur Tengah (7,84 persen), Eropa Timur dan Sentral Asia (8,44 persen), dan Amerika Latin dan Karibian 8.55 persen (World Bank Group Database, 2007). Begitu juga dengan jumlah kepadatan bisnis (diukur dengan banyaknya jumlah bisnis yang terdaftar per-1000 jumlah penduduk yang berusia aktif, 15-64 tahun) di Indonesia pada tahun 2003-2005, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kepadatan bisnis di benua lain. Jumlah kepadatan bisnis di Indonesia dan benua Asia sebanyak 2 bisnis per-1000 penduduk, sedangkan kepadatan bisnis di Afrika dan Timur Tengah adalah 13, Eropa Timur dan Sentral Asia adalah 38, dan Amerika Latin dan Karibian sebanyak 29 bisnis per-1000 penduduk (World Bank Group Database, 2007). Berdasarkan fakta ini, maka wajar perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia jauh berada di bawah ekonomi negara maju. Walaupun demikian, menurut Laporan BPS (2009), Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah berkontribusi sebanyak 53,6 persen terhadap Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) nasional dan mempekerjakan lebih dari 91,8 juta orang pada tahun 2008.

Para entrepreneurs di Aceh—yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah entrepreneurs pada level nasional (0,18 persen), jumlah entrepreneur baru yang masuk industri relatif sedikit dan juga jumlah kepadatan bisnis di Aceh yang sangat rendah,—sudah tentu, belum mampu berperan optimal dalam memajukan perekonomian Aceh. Agar ekonomi Aceh terus tumbuh dan berkembang, maka diperlukan jumlah entrepreneurs yang memadai. Bagaimana cara melahirkan para entrepreneurs di bumi Aceh? Sejauhmana peran institusi pendidikan nasional dan Aceh dalam mempersiapkan dan melahirkan para entrepreneurs? Apa saja yang harus dilakukan pemerintahan Aceh dengan institusi pendidikannya dalam melahirkan entrepreneurs? Selain melalui institusi pendidikan formal, apa saja yang bisa dilakukan pemerintah untuk melatih mereka yang putus sekolah untuk menjadi entrepreneurs? Bagian seterusnya dalam artikel ini akan coba membahas pertanyaan-pertanyaan ini.

### **PERAN INSTITUSI PENDIDIKAN DALAM MELAHIRKAN ENTREPRENEURS**

Target pemerintahan Aceh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hendaklah disertai dengan peningkatan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, lapangan kerja harus dibuka selebar-lebarnya kepada seluruh masyarakat Aceh, terutama para pengangguran yang berdomisili di daerah perkampungan, berusia muda, dan hanya tamatan SD, SMP dan SMA. Untuk menyediakan lapangan kerja, pemerintahan Aceh memiliki keterbatasan untuk merekrut mereka menjadi PNS. Maka diharapkan sektor swasta mampu memainkan peranan penting dalam menyediakan lapangan kerja kepada mereka. Agar sektor swasta tumbuh dan berkembang di Aceh, pemerintah harus menyediakan lingkungan bisnis dan investasi kondusif, seperti memberi insentif, merampingkan sistem birokrasi administrasi, membangun infrastruktur yang mendukung dan memberikan beberapa fasilitas penting lainnya.

Keberadaan sektor swasta pada umumnya, dan pengusaha, pebisnis atau entrepreneur pada khususnya dalam perekonomian Aceh, pasti akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh. Bank Dunia dalam Policy Working Paper-nya No. 4313 (2007) menyebutkan bahwa aktivitas entrepreneurship sangat diperlukan di era pasar modern yang sangat dinamis dewasa ini, dan munculnya entrepreneur baru dalam sebuah pasar akan menjadikan perekonomian sebuah negara semakin kompetitif, tumbuh dan berkembang (Klapper et al., 2007). Global Entrepreneurship Monitor (GEM) yang diinisiasikan



oleh London Business School dan Babson College pada tahun 1999 dan gencar melakukan penelitian terhadap aktivitas entrepreneurship di 59 negara di dunia, termasuk Indonesia, mendapati bahwa para entrepreneur telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di negara tersebut.

Yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana caranya melahirkan para entrepreneur di Aceh? Sudah tentu, institusi pendidikan baik formal maupun informal adalah institusi yang paling bertanggung jawab untuk mencetak para entrepreneur. Selama ini institusi pendidikan belum bekerja optimal dan bahkan dianggap mandul dalam melahirkan entrepreneur serta dituding sebagai “pabrik para pengangguran”. Ini, diantaranya, dapat kita lihat dari substansi kurikulum pendidikan baik di SD, SMP maupun SMA yang sama sekali tidak memuat materi entrepreneurship. Begitu juga kurikulum di SMK, substansinya masih didominasi teori dibandingkan praktek lapangan. Kelemahan kurikulum sekolah yang belum mengandung aspek entrepreneurship ini telah gagal menumbuhkembangkan jiwa entrepreneurship para anak didiknya sehingga ketika mereka tamat sekolah banyak yang terpaksa menganggur. Mereka semata-mata mengharapkan untuk dapat bekerja dengan orang lain dan pemerintah, tanpa berinisiatif untuk menciptakan bisnis sendiri dan bahkan turut memperkerjakan orang lain. Fenomena ini telah disadari oleh pemerintah pusat, Jakarta. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) bertekad untuk memasukkan kurikulum pendidikan kewirausahaan sebagai suatu mata pelajaran wajib di lembaga pendidikan mulai tahun 2010/2011.

Untuk mengurangi tingkat pengangguran, yang umumnya didominasi mereka yang hanya tamat SD, SMP dan SMA dan berusia 15 sampai 19 tahun, maka substansi kurikulum lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah harus memuat materi entrepreneurship sehingga setelah tamat sekolah nanti mereka akan sangat berpotensi untuk menjadi entrepreneur baru. Di samping substansi kurikulum yang memuat materi entrepreneurship, ketersediaan guru profesional yang memiliki skill dan pengalaman entrepreneurship, ketersediaan pusat pelatihan (training centre), terjalannya kerjasama dan kemitraan antara sektor swasta dengan lembaga pendidikan serta ketersediaan dana yang mencukupi adalah prasyarat utama untuk melahirkan entrepreneur di Aceh.

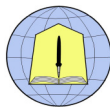
## **MUNJU PENDIDIKAN ACEH YANG BERBASIS ENTREPRENEURSHIP**

Entrepreneur merupakan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara dan daerah, termasuk Aceh. Merekalah yang melakukan investasi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dibandingkan dengan pertumbuhan dan kekuatan ekonomi negara Cina, pertumbuhan dan kekuatan perekonomian Indonesia berada di bawah Cina. Cina adalah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi pesat, 7,5 persen pada tahun 2009 dan bahkan mencapai 11,9 persen pada kuartal pertama tahun 2010 (International Financial Statistics, 2010). Cina bahkan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru yang sangat ditakuti negara-negara maju, terutama Amerika Serikat. Bangkitnya Cina adalah semata-mata disebabkan oleh pesatnya jumlah investasi di negara tirai bambu tersebut. Pada tahun 2009 dan 2010, jumlah investasi di Cina berbanding PDB-nya adalah, masing-masing, sebesar 48,24 dan 48,79 persen. Sedangkan untuk tahun yang sama, jumlah investasi di Indonesia hanya 30,99 dan 32,49 persen. Jumlah investasi di Indonesia bahkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan investasi di negara membangun Asia lainnya, yaitu 40,77 dan 42,14 persen pada tahun 2009 dan 2010 (World Economic Indicator, 2010). Menurut Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) tahun 2010, ranking entrepreneurship Indonesia (No. 46) jauh berada di bawah ranking Denmark (No. 1), Amerika Serikat (No. 3), Singapura (No. 15), Jepang (No. 29), dan Malaysia (No. 31) (Acs dan Szerb, 2010). Fakta ini menunjukkan bahwa aktivitas entrepreneurship berhubungan positif dengan kemajuan sebuah negara. Semakin banyak entrepreneur dan juga aktivitas entrepreneurship di sebuah negara, maka semakin maju dan sejahtera negara tersebut. Agar pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dan Aceh semakin meningkat, maka kehadiran entrepreneur dalam jumlah yang banyak adalah sebuah keniscayaan.

Untuk melahirkan entrepreneur professional di Aceh, melalui lembaga pendidikan, pemerintah harus berperan optimal. Kalau tidak, maka lembaga pendidikan akan terus dianggap sebagai “pabrik penganggur”, yang hanya memboroskan dana, tenaga dan sumber daya. Upaya untuk melahirkan entrepreneur yang memiliki usaha bisnis sendiri, berani mengambil resiko, berinisiatif dan pandai membuat kebijakan bisnis strategis bukanlah sebuah usaha yang mudah. Pemerintahan Aceh harus menetapkan kebijakan holistik, baik yang berkaitan dengan kebijakan lembaga pendidikan dan substansi kurikulumnya, skill dan pengalaman entrepreneurship yang harus dimiliki tenaga pengajar, lembaga pendidikan dan pelatihan maupun kebijakan menyangkut anggaran yang diperlukan (Abd. Majid, 2012). Berikut ini merupakan agenda penting yang segera harus dilakukan pemerintah Aceh dan institusi pendidikan di Aceh dalam rangka melahirkan lulusan yang berjiwa entrepreneurship.

### **Kurikulum Pendidikan Entrepreneurship**

Untuk memupuk jiwa entrepreneurship, lebih baik dilakukan sejak dini dan sebaiknya di usia 8-12 tahun, kata Ferdinand M. Latuperisa, Director YoungBiz Indonesia. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan entrepreneurship harus sudah diajarkan sejak SD. Rencana Depdiknas untuk memasukkan kurikulum



pendidikan entrepreneurship pada tahun 2010/2011 sebagai suatu mata kuliah wajib di SD, SMP, SMA dan sederajat harus segera direalisasikan di Aceh. Kebijakan ini diharapkan mampu merubah paradigma (paradigm shift) kalangan terdidik yang cenderung menjadi pekerja agar memiliki motivasi untuk membuka lapangan kerja baru atau menjadi entrepreneur.

Karena dorongan dari kalangan muda untuk melakukan entrepreneur dinilai masih rendah, maka diperlukan pendidikan entrepreneurship sejak dini. Penetapan kurikulum pendidikan entrepreneurship mendapat perhatian dan dukungan luas dari masyarakat. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Harian Seputar Indonesia terhadap 400 responden di enam kota besar di Indonesia selama periode 24-31 Desember 2009 tentang Kurikulum Pendidikan entrepreneurship, didapati bahwa mayoritas responden (75 persen) menyatakan kurikulum pendidikan entrepreneurship sudah perlu diterapkan di dunia pendidikan. Bahkan 67 persen responden meyakini bahwa penerapan kurikulum pendidikan entrepreneurship akan efektif menekan angka pengangguran. Agar kurikulum pendidikan entrepreneurship itu efektif, maka ianya harus menitikberatkan pada penggalan potensi diri setiap peserta didik dan dilakukan oleh para para pengajar yang berlatar entrepreneurship serta mendapat dukungan dari para stakeholder sekolah. Begitu juga dengan kurikulum pendidikan entrepreneurship di SMK, ianya juga harus memiliki ciri yang disebutkan di atas. SMK harus menyusun materi ajar yang applicable, mudah diserap oleh para siswa dan berorientasikan pada pembentukan skill, karakter, motivasi, semangat hidup, kreatifitas dan produktifitas. Materi ajar teoritis aplikatif perlu diberikan penekanan disertai dengan frekuensi latihan yang lebih banyak.

#### **Optimalisasi BLK dan Kemitraan dengan Industri**

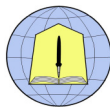
Para siswa dan juga mereka yang putus sekolah akan dapat menimba ilmu aplikatif dan sekaligus melakukan praktikum di Pusat Pelatihan atau Balai Latihan Kerja (BLK). Kehadiran BLK ini dapat dijadikan sebagai media untuk mencari pekerjaan atau berwirausaha secara mandiri. Dengan jangka waktu relatif pendek, kurang dari satu tahun, anak didik BLK biasanya sudah siap bekerja secara profesional dan bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang sesuai dengan minatnya. Selanjutnya, untuk mempertajam keahlian dan pengalaman entrepreneurship, lembaga pendidikan harus menjalin kerjasama dan membina kemitraan dengan UKM, asosiasi pengusaha termasuk Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan juga dunia industri. Selain mendapat kesempatan untuk menambah ilmu dan pengalaman entrepreneurship dengan melakukan magang (on job training) di organisasi tersebut, para siswa juga mendapat kesempatan untuk saling tukar-menukar informasi dan pengalaman dengan para entrepreneur yang sudah sukses.

#### **Menyediakan Modal Usaha**

Salah satu kendala utama untuk memulai bisnis adalah tidak tersedianya modal usaha. Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan Harian Seputar Indonesia (2009), mayoritas responden (79 persen) mengalami kesulitan untuk mendapatkan modal usaha untuk memulai bisnis. Hal ini penting karena modal merupakan salah satu aspek penting di dalam bisnis selain motivasi dan kesempatan yang tersedia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Aceh harus menginisiasi adanya sebuah lembaga keuangan khusus yang menyediakan pendanaan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dalam bentuk Skim Kredit Mikro Lunak (soft microcredit scheme) tanpa kolateral (agunan) dan berbasis pembiayaan berbasis syariah (Abd. Majid, 2012), khususnya diberikan kepada entrepreneur pemula. Sudah tentu syarat dan prosedur yang harus dipenuhi para pemohon harus ketat dan mereka yang sudah mendapatkan kredit ini harus di monitor dan dievaluasi secara regular.

Berdasarkan paparan di atas, dalam upayanya untuk membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat Aceh, maka pemerintah dan institusi pendidikan Aceh harus berusaha untuk melahirkan sebanyak mungkin jumlah entrepreneur di Aceh. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk melahirkan entrepreneur yang berkelulusan SD, SMP dan SMA di Aceh:

1. Materi pengajaran di lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat harus mengintegrasikan nilai-nilai entrepreneurship yang berwawasan potensi daerah ke dalam kurikulum dimana sistem pengajarannya lebih memfokuskan pada praktikum dibandingkan dengan teoritis.
2. Memperkuat dan memberdayakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sudah ada sejak tahun 1994 di Aceh dan mengupayakan pendirian SMK yang mampu mendukung pengembangan sektor andalan pembangunan Aceh. .
3. Pihak sekolah harus mengidentifikasi sejak dini para siswa yang tidak berminat untuk melanjutkan studi sampai ke jenjang perguruan tinggi, sehingga mereka dapat masuk SMK untuk dipersiapkan dengan matang agar menjadi entrepreneur setelah tamat sekolah.
4. Menyediakan Pusat Pelatihan dan Inkubasi Bisnis (Training and Incubation Business Centre) atau Balai Latihan Kerja (BLK) yang memadai sebagai tempat pembinaan jiwa entrepreneurship siswa dengan



melakukan praktikum intensif. Mereka yang berusia muda dan tidak bersekolah juga harus diikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan entrepreneurship di BLK.

5. Lembaga sekolah harus membina kerjasama dan membangun kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan juga pihak swasta lainnya sehingga siswa dapat melakukan magang (on job training) di organisasi-organisasi tersebut dan juga pihak swasta ini berperan aktif untuk permodalan dan pembinaan skill entrepreneurship bagi para siswa sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).
6. Meningkatkan kualitas, skill dan pengalaman para guru berkaitan dengan bidang kajian entrepreneurship.
7. Menginisiasikan Skim Pinjaman Mikro Lunak (soft microcredit scheme) yang berbasis syaria'ah untuk para entrepreneur pemula sebagai modal usahanya. Pemerintah perlu memberi penghargaan secara reguler dan kontinyu bagi para entrepreneur yang sudah sukses baik dalam bentuk penambahan modal, kesempatan magang dengan para entrepreneur internasional maupun dalam bentuk penghargaan non-materi lainnya.

## SIMPULAN

Masalah pengangguran, kemiskinan dan disparitas pendapatan di Aceh sangat erat kaitannya dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kualitas SDM ini tidak dapat dipisahkan dengan kualitas pendidikan. Untuk mengatasi problema ekonomi di Aceh, salah satu bentuk pendekatan yang sangat strategis adalah melalui pendidikan entrepreneurship. Pendidikan entrepreneurship baik yang diajari di lembaga pendidikan formal (seperti di SD, SMP, SMA dan SMK) maupun informal (seperti di BLK) dipercayai mampu menawarkan solusi alternatif terhadap problema ekonomi tersebut, yang pada gilirannya, akan mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat Aceh. Agar pendidikan entrepreneurship ini efektif dan mampu melahirkan entrepreneur muda, maka lembaga pendidikan harus mereformulasikan kurikulumnya yang berbasis entrepreneurship, menggalang kerjasama dan membangun kemitraan dengan pihak swasta, pemerintah dan juga mendapat dukungan masyarakat. Begitu juga dengan para tenaga pengajar, kualitas, skill dan pengalaman entrepreneurship mereka senantiasa harus ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Majid, M. Shabri. (2012). *Entrepreneur: Motor Penggerak Ekonomi Aceh*, Serambi Indonesia, 20 Juni. Aceh Dalam Angka. (2014).
- Acs, Z.J. dan Szerb, L. (2010). *The Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI)*, Makalah dipresentasikan pada the Summer Conference on Opening Up Innovation: Strategy, Organization and Technology di Imperial College, London Business School, Juni 16-18.
- Badan Pusat Statistik Aceh. (2014).
- Global Entrepreneurship and Development Index. (2010).
- Harian Seputar Indonesia. (2009). *Jejak Pendapatan tentang Hambatan Bisnis*, Jakarta.
- International Financial Statistics. (2010).
- Klapper, L., Amir, R., Guillen, M.F., dan Quesada, J.M. (2007). *Entrepreneurship and Firm Formation across Countries*, World Bank Policy Research Working Paper, No. 4313: 1-35.
- Richard T. Froyen. (2009). *Macroeconomics: Theories and Policies*, 9th ed. USA: Prentice Hall.
- World Bank Group Database. (2007).
- World Bank. (2010). *World Economic Indicator*. <http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/>. Diakses pada 28 Oktober 2010.